

E - NOTULEN

RISALAH PERCAKAPAN RAPAT RDP BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2023
Pukul : 11:26 – 12:14 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bapemperda
Lt.III Gedung Baru DPRD Provinsi
DKI Jakarta
Acara : Undangan Rapat RDP Bapemperda

Rapat RDP Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta di hadiri oleh :

Pimpinan Rapat : H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Anggota DPRD : 1. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI
Jakarta

Eksekutif : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi
DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kadis Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
6. Direktur produk hukum daerah kementerian dalam negeri RI
7. Dewan Energi Nasional
8. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
9. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Dan Gas Bumi
10. Direjen EBTKE

Sesuai Surat Undangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 304/HK.01.02
Tanggal 04 April 2023 Perihal Penyerapan Aspirasi terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Adapun hasil percakapan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

11:26:13 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Baik kita mulai bapak ibu sekalian mohon maaf agak terlambat karena beberapa hal selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya rapat saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum

Yang saya hormati dari kementerian dan lembaga republik indonesia di sini yang terundang Direktur Jenderal ketenaga listrikan dan kementerian ESDM RI Direktur Jenderal energi baru terbarukan dan konservasi energy, Kementerian SDM RI Direktur Jenderal minyak dan gas Kementerian ESDM RI, direktur produk hukum daerah, Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, kepala kantor wilayah provinsi DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI

Kemudian Bapak Nanang Kristianto koordinator Pokja fasilitasi rencana umum energy, dewan energi nasional, kemudian dari BUMN Direktur Utama PT PLN persero yang saya hormati juga Direktur PT Pertamina persero, yang saya hormati asisten perekonomian dan keuangan sekda provinsi DKI Jakarta, asisten pemerintahan provinsi DKI Jakarta, Inspektur DKI Jakarta, Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pak Hari transmigrasi dan energi provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Cipta Karya tata ruang dan Pertanahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro pembangunan dan lingkungan hidup setda Provinsi DKI Jakarta, kepala biro hukum setda Provinsi DKI Jakarta

Kemudian dari situs berita online detik.com, berita Jakarta, tempo, tribunnews dan kompas, kemudian unsur perguruan tinggi yang kita undang universitas indonesia, universitas negeri Jakarta, universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, universitas Trisakti, Universitas dr.moestopo, universitas Atmajaya, universitas Pancasila universitas Bina Nusantara

Kemudian unsur asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat himpunan wiraswasta minyak dan gas kemudian yayasan Mitra hijau, yayasan lembaga konsumen Indonesia Wahana lingkungan atau WALHI, bapak Ibu sekalian sesuai dengan undangan pada hari ini rapat adalah dalam rangka penyerapan aspirasi terhadap perancangan peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah

Oleh karena itu saya persilahkan untuk pak Hari untuk menyampaikan presentasinya dan, kemudian nanti akan mendapatkan masukan-masukan dari para hadirin semuanya makasih silakan pak Hari

11:35:29 Kadis Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Hari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera kita semua yang terhormat pak Suhaimi selaku pimpinan sidang teman-teman para para OPD hadir dalam offline maupun para undangan yang hadir di online, kami akan menyampaikan paparan berkaitan dengan rencana umum energi daerah atau RUED provinsi di Jakarta

Dasar hukum penyusunan rencana umum daerah provinsi daerah khusus ibukota Jakarta merupakan amanat dari undang-undang nomor 30 tahun 2007, tentang energi pasal 18, yang mewajibkan daerah untuk menyusun RUED dan menetapkan dalam peraturan daerah

Jadi memang kita sudah agak ketinggalan pak harus sudah 1 tahun, 2 tahun hari ini udah hampir 45 tahun yang kedua Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana energy nasional

Ketiga Peraturan Presiden nomor 22 Tahun 2017 tentang rancangan umum energi nasional atau RUEN

Kita lihat latar belakang jadi dengan adanya undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi dan pasal 18 undang-undang nomor 30 tahun 2007 dan dasar penyedia energi ibukota, sehingga kita wajib hukumnya untuk merancang peraturan daerah rencana umum edisi daerah RUED di DKI Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2014 rancangan RUED memuat

1. Kondisi energi saat ini dan di masa mendatang
2. Visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai
3. Kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah

Kemudian visi energy provinsi DKI Jakarta terpenuhinya kebutuhan energi yang berwawasan lingkungan dan terdepan dalam pemanfaatan teknologi energi dengan mendorong peran serta masyarakat

Jadi terpenuhinya kebutuhan energi yang berwawasan lingkungan adalah suatu kondisi pasokan Indonesia cukup dan berdampak minimal terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat provinsi DKI Jakarta

Terdepan dalam pemanfaatan teknologi energi adalah bahwa provinsi Jakarta bertekad untuk menjadi pelopor dalam pemanfaatan teknologi energi yang lebih hemat energi yang berbasis baru dan terbarukan

Kemudian mendorong peran serta masyarakat dalam peran serta masyarakat menjadi kunci suksesnya pengembangan dan pembangunan sector energi di provinsi Jakarta

dari visi kita jabarkan misi yaitu

1. Menjamin ketersediaan energi secara merata dan bersinambungan
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan
3. Meningkatkan kegiatan konservasi dan diversifikasi energi
4. Meminimalisasi dampak lingkungan dari sector energy
5. Mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi

Nah kita kalau kita buat sistematika dari kondisi ini saat ini adanya visi misi energi kita punya program kegiatan dan ekspektasi masa mendatang tujuan

1. Tersedianya energi secara merata dan berkesinambungan
2. Pemakaian energy yang efisien melalui konservasi energi
3. Terkendalinya pencemaran lingkungan dari sektor energi
4. Pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan secara optimal
5. Berkurangnya penggunaan BBM melalui diversifikasi energi
6. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energy

kita punya kebijakan pengelolaan energy provinsi DKI Jakarta

1. Penyediaan energi yang cukup, aman, dan andal artinya disini adalah menjamin kecukupan dan keandalan pasokan energi
2. Pemanfaatan EBT energi terbarukan artinya mencapai targetkan KEN tentang pengembangan EBT
3. Peringatan konservasi dan diversifikasi energi itu mengurangi laju pertumbuhan permintaan energi dan mengurangi pemakaian BBM dan LPG
4. Pengurangan dampak lingkungan dari sector energi adalah mengurangi emisi dari sektor energi
5. Penyediaan energi untuk pengolahan kepulauan seribu menyediakan energi untuk pengembangan kepulauan seribu
6. Peningkatan kemampuan pengelolaan energi yaitu mengembangkan kemampuan SDM di bidang energy

kemudian sasaran

1. Terpenuhinya infrastruktur kelistrikan, khususnya jaringan transmisi dan distribusi listrik, gardu induk, dan gardu distribusi termasuk untuk Kepulauan Seribu
2. Terbangunnya ducting utilitas terpadu untuk penyaluran listrik
3. Terpenuhinya infrastruktur distribusi gas bumi untuk sektor rumah tangga, komersial, transportasi, industry, dan membangun pembangkit listrik
4. Terpenuhi infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG
5. Tersedianya database energi baru dan terbarukan untuk perencanaan dan pengelolaan energi di provinsi Jakarta
6. Terpenuhi target pemakaian energi baru terbarukan terdiri atas tenaga surya, tenaga bayu, bio-energi atau sampah bahan bakar nabati, dan hidrogen paling

sedikit sebesar 0,67 MTOE pada tahun 2025 atau 4,5% dari total bauran energi primer dan 2,14 MTOE pada tahun 2050 7,6% dari total bauran energi primer

7. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS dengan target total kapasitas paling sedikit 20 megawatt, pada tahun 2025 dan 200 megawatt pada tahun 2050
8. Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PLTSa dengan target total kapasitas paling sedikit 35 megawatt pada tahun 2025 dan 100 megawatt pada tahun 2050
9. Pembangunan pembangkit listrik tenaga Bayu PLTB dengan target total kapasitas paling sedikit 0,5 megawatt pada tahun 2025 dan 2 megawatt pada tahun 2050
10. Pembangunan pembangkit listrik tenaga hydrogen (PLTH) dengan target total kapasitas paling sedikit 100 megawatt pada tahun 2050
11. Konservasi energi di sector rumah tangga, bangunan komersial, dan bangunan publik melalui standarisasi, audit energi dan pembudayaan hemat energi
12. Konservasi energi di sektor transportasi melalui pengalihan ke transportasi massal
13. Peningkatan penggunaan gas bumi di sektor rumah tangga, komersial, industri dan transportasi
14. Peningkatan penggunaan kompor listrik paling sedikit 50% rumah tangga menggunakan kompor listrik pada tahun 2050
15. Penggunaan mobil listrik, sepeda motor listrik, dan bis listrik paling sedikit 10% dari total kendaraan pada 2030 dan 75% dari total kendaraan pada tahun 2050
16. Penggunaan mobil listrik berteknologi hydrogen paling lambat mulai tahun 2030 pada tahun 2050 menjadi 20% dari mobil listrik yang ada
17. Pengendalian dan pencegahan emisi gas rumah kaca dari sector energy
18. Pengendalian dan pencegahan polusi udara dari sector transportasi, industry, dan pembangkit listrik (khusus PLTSa)
19. Penyediaan energy di kepulauan seribu, meliputi penyediaan listrik Grid, pengembangan pembangkit EBT, serta penyediaan BBM dan LPG
20. Peningkatan kemampuan pengelolaan energy bagi aparatur sipil Negara (ASN), peningkatan kualitas pendidikan di bidang teknologi energy dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energy

jangkauan maupun arah pengaturannya sehingga sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan stakeholder pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, dan menjamin terselenggaranya upaya yang terencana, sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan dalam hal pengelolaan energi di masa mendatang

Jadi nanti arah pengaturannya yaitu mewujudkan tata kelola di bidang keenergian yang akan diimplementasikan dengan program-program daerah, dalam kegiatan tahunan oleh instansi terkait demikian pak terima kasih *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

11:37:08 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terima kasih pak kadis atas presentasinya yang saya kira singkat tapi sudah masuk pada poinnya yang intinya ini adalah tuntutan ya yang memang daerah harus ada perda terkait dengan rencana umum energi daerah

Selanjutnya saya kira kita persilahkan kepada para undangan untuk memberikan masukan-masukan mungkin dimulai dari kementerian terlebih dahulu bila sudah hadir via zoom dipersilahkan dari direktur jenderal ketenagalistrikan, kementerian ESDM RI ada atau dari yang lainnya yang sudah siap untuk memberikan masukan dari direktur produk hukum daerah pak Marbun ada silakan pak.

11:49:32 Direktur produk hukum daerah kementerian dalam negeri RI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan, pimpinan rapat yang saya hormati ini bapak/bu terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya direktur produk hukum daerah Kementerian Dalam Negeri

Saya mungkin dari DEN mudah-mudahan hadir di sini enggak tahu diundang enggak Den untuk dewan energi nasional untuk kita bersama-sama mempercepat perda RUED ini rencana umum energi daerah ini yang pertama saya sampaikan tadi Kepala Dinas tadi pemerkas

saya mudah-mudahan ini sudah menjadi rencana kerja dari perangkat daerah terkait saya sampaikan kepada teman-teman di bapak/bu bahwa ini memang sudah sangat terlambat ya DKI sudah sangat terlambat, jadi kalau kita lihat sama dengan ini dengan di Papua jadi DKI ini sudah sangat terlambat, dan bahkan ini tinggal beberapa daerah yang belum provinsi yang belum membuat perda rencana umum energi daerah ini nah tapi enggak apa-apa lah daripada sama sekali tidak dilakukan

tapi ini sudah masuk di program Perda 2023 yang pertama saya sampaikan bahwa tadi sudah jelas bahwa memang pedoman daripada pembentukan rancangan-rancangan perda rencana umum energi daerah ini memang kita kemarin ini sudah buat tim bersama dengan Den dan saya juga bersama dengan DEN sudah berapa kali ke daerah untuk melakukan percepatan terkait dengan rancangan perda RUED tersebut

Kita bersama-sama dengan teman-teman dari DEN untuk segera menginisiasi terakhir kemarin di Banten dengan di Kalimantan Tengah dan salah satu lagi di Sulawesi Utara sebenarnya ini amanatnya kan sudah ada disampaikan tadi, bahwa amanatkan sudah lama sebenarnya sudah ada undang-undang 30 2007 ada perpres 1 2014 dan perpres 22 tahun 2017, nah ini sebenarnya kenapa ini sangat *urgent*

Karena memang ini terkait dengan kewenangan kalau kita bicara dengan pembagian kewenangan ini, karena ini kewenangan dari provinsi kemendagri memang kalau kita

lihat autonominya kan hanya di provinsi, kalau di provinsi lain bahwa memang ini menjadi prioritas karena urusan energi itu kan urusan provinsi nah itulah membuat kenapa kita kemari bersinergi melakukan percepatan-percepatan penyelesaian dan draft daripada rancangan perda ini

Saya pikir sudah ada sudah banyak sudah hampir seluruh 30 provinsi yang sudah hampir mendekati sudah selesai draft daripada rancangan perda ini sudah ada tidak perlu lagi kita melakukan apa namanya pembahasan yang sangat memakan waktu dan lama artinya ini kan kalau nanti rancangannya disampaikan kepada saya kepada kami ke pmdagri nanti saya bersama-sama dengan teman-teman dari DEN nanti akan sudah secara cepat ini akan kita menyesuaikan dengan prototype yang sudah kita buat tentunya nanti disesuaikan saja dengan apa namanya situasional ataupun kebutuhan wilayah masing-masing

Nah kalau kita lihat dalam penyusunan rencana umum energi daerah di provinsi ini kan di pasal 16 ya sudah jelas disebutkan bagaimana kita disusun bagaimana kita minta di pasal 20 bagaimana pelibatan masyarakat dan penyusunan RUED tersebut masyarakat dan pelaku-pelaku apa namanya stakeholder itu harus dilibatkan, bagaimana mereka kelompok masyarakat berperan aktif dan baik dan bahkan mungkin dari pada akademisi

Kemarin di Banten itu sangat bagus dari akademisi itu hadir waktu kita bahas di DPRD mereka hadir menyampaikan apa sih yang diprioritaskan di kabupaten kota di provinsi Banten itu tersebut, ini menjadi sangat bagus menurut saya sehingga waktu kami melakukan fasilitas di saya mengingat betul apa yang disampaikan oleh teman-teman akademisi dari beberapa perguruan tinggi tersebut untuk kita sesuaikan

Kenapa peran masyarakat itu sangat dibutuhkan karena nanti dalam membuat regulasi kebijakan itu kan mengatur masyarakat sehingga masukan-masukan memang harus perlu disampaikan melalui masyarakat, pembahasannya pun tidak boleh tertutup memberi ruang saya mudah-mudahan di dalam zoom meeting ini ada sekitar 76 orang yang hadir di zoom meeting ini

Saya pikir nanti teman-teman yang dari pemerhati terkait dengan apa namanya energi energi inikan bisa memberi masukan-masukan, saya sampaikan di forum ini bahwa progress daripada perda RUED di provinsi dari sekarang ini kan ada 38 provinsi kalau kita kemarin berangkat dari 34 provinsi sebelum 4 DOB yang baru memang ada sekitar hanya yang belum menyusun perdanya yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Papua Barat dan papua

Jadi hanya tinggal 5 provinsi yang belum dari 34 jadi yaitu Riau, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Papua Barat dan papuanya ada lima, kalau Sulawesi Utara sudah hampir selesai dan bahkan sudah sudah masuk ke kita berarti sebenarnya tinggal 4 yaitu apa namanya Kepri DKI Jakarta Papua Barat dan papua, karena sekarang itu sudah 4 DOB baru sehingga menjadi tambah lagi 4 menjadi sekarang ada sekitar 8 yaitu Provinsi Papua pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya,

Kalau kita melihat proses pembentukannya tentunya memang kita sudah sampaikan dari awal bahwa proses pembentukannya itu harus diawali dulu dari propemperda ini

terima kasih sudah masih di propemperda di 2023, nah di perencanaan ini kita sekarang masih tahap penyusunan kalau nggak salah ini sekarang penyusunan

karena dalam penyusunan itu kan melibatkan stakeholder dan ini sehingga masuk di langkah kedua dalam propemperda sudah sekarang masuk di penyusunan kita bahas pada pada siang hari ini, mudah-mudahan setelah pembahasan di tentunya di DPRD masa pertama sampai nanti masa fasilitasi kita sampai diundangkan saya pikir ini kan bisa lebih cepat dan kami juga mungkin apabila nanti sudah disampaikan kepada kami mudah-mudahan teman-teman dari dinas yang sudah memprakarsai ini dengan teman dari sekwan juga dari biro hukum juga mungkin sudah hadir di sini

Tentunya kan sudah melihat dari perda kita di perda kita kan sudah ada jadi sudah ada tadi 30 provinsi yang sudah ada dan itu sudah ada prototype-nya hampir semua sudah hasil diskusi kita bersama dengan dewan energi nasional, jadi artinya untuk pembuatan rancangan perda RUED ini di DKI saya pikir enggak terlalu mengalami kesulitan pimpinan rapat artinya ini kan sudah ada 29 yang sudah jadi dan bahkan 30 yang sudah jadi

Artinya itu tinggal di apa namanya di sesuaikan saja sebenarnya kebutuhan dari Provinsi DKI Jakarta, jadi mudah-mudahan nanti hasil dari pembahasan hari ini bisa dipercepat sampai di kita dari kami juga tidak lama, karena memang sudah ada beberapa hasil pengkajian kita bersama dengan dewan energi nasional, saya pikir nanti kami dalam fasilitasnya pun tidak mengalami kesulitan karena ini kan sudah hal yang biasa berulang-ulang yang kita lakukan

Dan nanti kita lihat apa prioritas di DKI ataupun bagaimana kearifan lokal yang akan disampaikan di DKI kita sesuaikan saja menurut saya jadi saya pikir itu dulu yang bisa sampaikan mungkin saja memang karena dilihat dari ketersediaan energi nasional nanti itu kan penduduk di Jakarta sangat luar biasa kan hampir 6 juta lebih, artinya ini kan menjadi salah satu nanti yang akan disusun yang akan dibuat di dalam rancangan perda tersebut

Mudah-mudahan rancangan perda ini masuk diselesaikan dalam bulan April ya pak karena saya pikirkan ini sangat urgen tadi sampaikan tadi saya mohon maaf tadi saya bukan saya bandingkan dengan provinsi lain, tetapi kan memang hanya di luar Papua hanya memang kepri dengan DKI Jakarta kalau Sulawesi Utara dan selesai karena kemarin kita kan ada di sana bersama dengan teman-teman di provinsi Sulawesi Utara untuk membahas dengan teman-teman dari DEN

kemarin kan DEN di undang kesana ada kegiatan di sana kita bersama-sama saya pikir itu mungkin yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan percepatan ini kami di kemendagri terutama di karena ini menjadi tugas saya saya pikir sampai di kita tidak kesulitan karena kita sudah punya prototype sudah punya personal sudah punya apa namanya kajian yang sudah kita lakukan untuk nanti disesuaikan apabila ini sudah secara politis secara proses sudah sudah berlangsung sudah apa namanya sudah dibahas di tingkat pertama nanti di DPRD mungkin itu yang saya sampaikan terima kasih.

11:50:16 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Makasih pak Marbun sebagai Direktur Produk hukum Kementerian Dalam Negeri yang sudah memberikan arahnya mudah-mudahan nanti kita segera bisa selesaikan pak sesuai dengan harapan

mudah-mudahan April bisa diselesaikan mudah-mudahan ya. baik pak pantas sudah hadir nih pak tadi ada yang menanyakan pak pantas. Baik selanjutnya kita persilahkan dari DEN iya silahkan pak

11:53:24 Dewan Energi Nasional

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua pak pertama saya ingin menyampaikan bahwa, menjaga keamanan pasokan energi di Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2050 dan bagaimana kita dari sisi suplai menyediakannya

kemudian menyediakan energi untuk rencana pengembangan maupun pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Mungkin saya mungkin bahwa saat ini sudah ada 30 provinsi pak Marbun yang sudah menyusun Perda RUED

jadi sudah jadi Perda Nomor 8 Tahun 2022 per tanggal 30 Desember tahun 2022 jadi memang tinggal 4 provinsi yang disampaikan yang belum menyelesaikan Perda RUED di luar di bop yang baru yaitu DKI Jakarta, kepulauan Riau, papua dan papua barat ya

kami di DEN mendampingi seluruh provinsi dalam penyusunan RUED provinsi ini gitu ya kemudian terkait dengan ke khasan suatu wilayah memang kita tidak bisa memukul ratakan antara satu provinsi dan provinsi yang lain

karena potensi energinya pun berbeda gitu ya jadi memang RUED DKI Jakarta tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di DKI Jakarta mungkin dari segi potensi energi baru terbarukan tidak terlalu besar dan mungkin lebih banyak kegiatannya di bidang konservasi kendaraan listrik dan lain-lain itu mungkin sudah masuk di dalam draft Perda RUED

Kemudian kami jadi hewan energi nasional juga membuka konsultasi jika anggota DPRD nanti mau beraudiensi dengan anggota DEN baik itu di kantor DPRD maupun di kantor DEN kami siap terbuka untuk menerima bapak ibu dalam melakukan audiensi maupun diskusi terkait dengan Perda RUED ini sebagaimana dilakukan oleh DPRD DPRD dari provinsi yang lainnya.

Mungkin sementara itu mendapatkan pimpinan sidang *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

11:53:56H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terima kasih pak atas masukannya mudah-mudahan nanti juga akan bisa di follow up untuk dialog berikutnya silahkan dari yang lainnya dari asosiasi? Oh ya silahkan pak dari LKI

11:58:18 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Terimakasih bapak pimpinan *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh* Selamat siang komentar umum bahwa RUED satu rencana energi daerah Bagi DKI Jakarta memang sangat penting karena jika ini kan daerah yang konsumtif terhadap energi

walaupun kami yakin karena ini ibukota walaupun nanti sementara itu sudah tidak menjadi ibukota tapi kalau dari sisi aspek keamanan pasti akan diprioritaskan sehingga aspek *security supply*-nya akan lebih dipribaskan karena akan menjadi parameter nasional

tetapi yang ada beberapa draf tadi yang pertama memang secara umum kami melihat sudah cukup baik ya sudah banyak menyorot dari berbagai aspek tetapi ada beberapa catatan dari saya

H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

ijin pak putus-putus suaranya terputus-putusya

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

iya harus ada ini pak ijin selain apa namanya keamanan pasokan kita lihat energi karena sebagai dampak pemanasan global harusnya itu menjadi lebih dominan nah saya belum melihat secara signifikan soal upaya menuju transisi energi ya itu yang pertama

yang kedua tadi juga sudah banyak instrumen-instrumen untuk adanya instalasi yang ramah lingkungan, mengapa di dalam draft ini tidak menyebut soal mandatory bahwa harusnya untuk level DKI Jakarta untuk mengurangi polusi itu menggunakan bahan bakar yang standar euro tapi dikatakan ini kan mayoritas juga masih menggunakan bahan bakar yang kualitas rendah dalam hal ini *pertalite*

dulu zamannya pak ahok pernah mengatakan di Jakarta harus menggunakan bahan bakar pertamax tetapi bukan soal pertamax untuk DKI Jakarta adalah bahan bakar yang minimal standar itu syukur-syukur sudah standarnya sudah euro four

Nah ini kita harusnya di DKI Jakarta harus menggunakan itu mohon dimasukkan ke dalam web DKI Jakarta ada juga soal gas kota ya tadi

11:59:20H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Masih terputus-putus pak suaranya. Makasih pak masukannya mudah-mudahan sudah bisa ditangkap garis besarnya untuk selanjutnya dipersilahkan dari walhi mungkin iya atau dari hiswana hiswana Migas dari Yayasan Mitra hijau ada? Iya silahkan

12:00:43 Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Dan Gas Bumi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat pimpinan rapat sedikit menyampaikan saja bahwa Hisana migas kami bersama Pertamina fokus untuk menyalurkan energi baik itu BBM dan Gas yang apa tepat sasaran, fokus kami bagaimana menyalurkan bahan bakar minyak dan gas ini tepat sasaran kepada masyarakat.

Jadi itu mungkin saat ini yang sedang fokus kami lakukan bersama Pertamina, ada penyaluran lebih tepat sasaran, mungkin itu saja baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

12:01:04 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih pak, masih ada yang lainnya, sambil menunggu mungkin pak Kadis memberikan respon terlebih dahulu saya persilahkan.

12:03:18 Kadis Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Hari

Baik terima kasih pak pimpinan sidang, ya terima kasih tadi masukan dari pak Marbun ya, memang kita terlambat pak, memang ya kalau kita lihat, kita tarik ke belakang itu memang dulu diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan energi, kemudian karena dinas perindustrian dan energi itu, terjadi restruktur organisasi bubar, akhirnya energinya masuk ke dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi.

Nah di sini mungkin belum berkembang, karena dinakertrans ini kan berkaitan dengan UMP, kemudian meidi dan sebagainya energinya tertinggal, maka sekarang kita lanjutkan kembali mudah-mudahan ketinggalan ini tidak membawa dampak yang kemana-mana yang penting nanti insya Allah April Mei selesai.

Kemudian berkaitan dengan masalah *Prototype* ya memang betul pak ini kan pasal demi sedikit, hanya saja nanti di lampirannya, lampirannya nanti kita akan modifikasi karena memang keterkaitan energi di masing-masing wilayah itu beda-beda, ada yang mempunyai sumber energi minyak, fosil Ada atau yang tidak punya, kemudian kondisi geografis dan kita juga Jakarta termasuk energi baru juga bisa berkembang PLTS nya, apalagi nanti dikonversi energinya pak, kita bisa modifikasi dari BBM pindah ke mobil listrik.

Kita juga sudah mau mulai mempersiapkan stasiun pengisiannya juga pak SPKL nya itu, kita bangun tahun ini 2 ya tahun ini 2 dan ke depan nanti bisa 6, berkembangnya nanti publistik nanti yang akan bergerak di Jakarta.

Kemudian dari masalah di dari teman-teman yang LKI ya memang betul pak, nanti oktan tinggi yang nanti akan kita pakai dan akan beralih ke mobil listrik, mungkin demikian pak untuk sementara tanggapan dari kami mungkin dari teman-teman yang lain terima kasih.

12:03:44 Pantas Nainggolan, SH., MM

Selanjutnya dari rekan-rekan ataupun dari segenap undangan yang yang sudah siap untuk menyampaikan pandangannya silahkan.

12:09:33 Direjen EBTKE

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati pak pimpinan rapat dan para hadirin sekalian, izin menyampaikan hal-hal terkait dengan pembahasan Perda RUED di DKI.

Jadi pertama kami dari Dirjen EBTKE sangat support untuk RUED ini segera terselesaikan, karena RUED ini menjadi komitmen bagi pemerintah, daerah pemerintah DKI, untuk mencapai target bauran energi seperti yang sudah ditetapkan.

Bahwa untuk bauran energi nasional tahun 2025 itu targetnya 23% dan saat ini tahun 2022 itu dari target 15% itu juga baru tercapai di angka 12 koma sekian, jadi target capaian bauran secara nasional itu masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semuanya dan oleh karenanya kami sangat *support* atas *komitmen* Pemda DKI melalui RUED ini pak.

Dan juga perlu kami laporkan bahwa pada akhir Januari yang lalu, tanggal 25 itu sudah terbit Perpres nomor 3 2023, itu terkait dengan tambahan kewenangan pemerintah daerah atas pengelolaan EBT.

Jadi Perpres itu sebagai apa ya untuk melengkapi atau menambahkan kewenangan sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang 23 tahun 2014, jadi sejak Perpres

diterbitkan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih di dalam pengelolaan EBT.

Jadi apa dasar dari Perpres ini diterbitkan, karena Pemda sudah memiliki RUED untuk mewujudkan RUEN, namun kewenangannya masih terbatas oleh karena itu dengan adanya terbit yang Perpres diharapkan pemerintah daerah bisa mengakselerasi komitmen, terhadap pengelolaan EBT untuk mendukung, untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan.

Kemudian juga kami sepakat dengan tadi YLKI juga pak Kadis tadi sampaikan, bahwa di DKI mungkin dari sisi konservasi energi itu yang lebih lebih dimasifkan begitu pak ya, kalau dari sisi pembangkitan, dari sisi suplai mungkin yang paling potensi paling besar ya surya dan, surya mungkin pak ya tapi kalau dari sisi kontroversi dari sisi efisiensi energi mungkin itu menjadi hal-hal yang perlu ditonjolkan.

Juga dapat kami laporkan bahwa saat ini pemerintah pusat sedang melakukan akselerasi atas kendaraan listrik, berupa di dalam 1 tahun, dalam 2 tahun ini 2023 dan 2024 itu pemerintah pusat sudah mengalokasikan untuk adanya 1 juta bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik berupa apa ya tambahan atau potongan harga untuk kendaraan baru.

Dan juga konversi itu untuk sepeda motor yang 7 juta rupiah per unit itu di dalam 2 tahun ini ditargetkan satu juta pak, jadi kami berharap Pemerintah Provinsi DKI, juga mau apa ya mengantisipasi, akan ketersediaan juga stasiun pengisian listriknya gitu infrastrukturnya, mensupport dari sisi infrastruktur.

Dan memang isu dari transisi energi, ini memang dari sisi anggaran dan kami berharap juga bahwa pemerintah DKI dengan APBD yang cukup besar ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi *benchmarking* di dalam peningkatan bauran EBT, baik dari sisi *demand* dari sisi pembangkitan, maupun dari sisi eh dari sisi *supply* dari sisi pembangkitan maupun dari sisi *demand*, dari sisi *efisiensi* dan *konservasi* energinya, mungkin itu pak sebagai awal yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas waktunya waktu kami kembalikan *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

12:14:15 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Makasih pak masukan yang sangat berharga tadi, untuk selanjutnya dipersilahkan yang sudah hadir via zoom dari kementerian tenaga kelistrikan SDM, kementerian SDM ada, ya dari perguruan tinggi dari unsur perguruan tinggi dipersilahkan bila ada masukan-masukan, dari Universitas Indonesia ada, dari UNJ, dari UIN Syarif Hidayatullah, dari Trisakti, dari Universitas Prof Dr Musthofa, dari Atmajaya, dari Universitas Pancasila tidak ada, dari Universitas Bina Nusantara tidak ada.

Saya lanjutkan dari media mungkin, detik.com ada, dari berita Jakarta, tempo, Tribunnews, Kompas atau yang lainnya barangkali masih ada yang memberikan masukan.

Sepertinya sudah tidak ada yang memberikan masukan, tetapi kita tetap menerima masukan-masukan secara tertulis, selama proses pembahasan nantinya, saya kira apabila sudah tidak ada rapat kita akhiri.

Inshaallah kita akan lanjutkan pada tahapan-tahapan berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga, baik dari kementerian maupun dari para ahli, *stackholder*.

Mudah-mudahan di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, semuanya yang kita lakukan ini mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita akhiri rapat pada hari ini dengan mengucapkan *Alhamdulillahilalamin* rapat saya tutup *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.